

BAB III

KERJASAMA PERTANIAN ANTARA INDONESIA DAN THAILAND

PADA TAHUN 1967-1996

3.1 Kondisi Pertanian Indonesia Pada Tahun 1967-1996

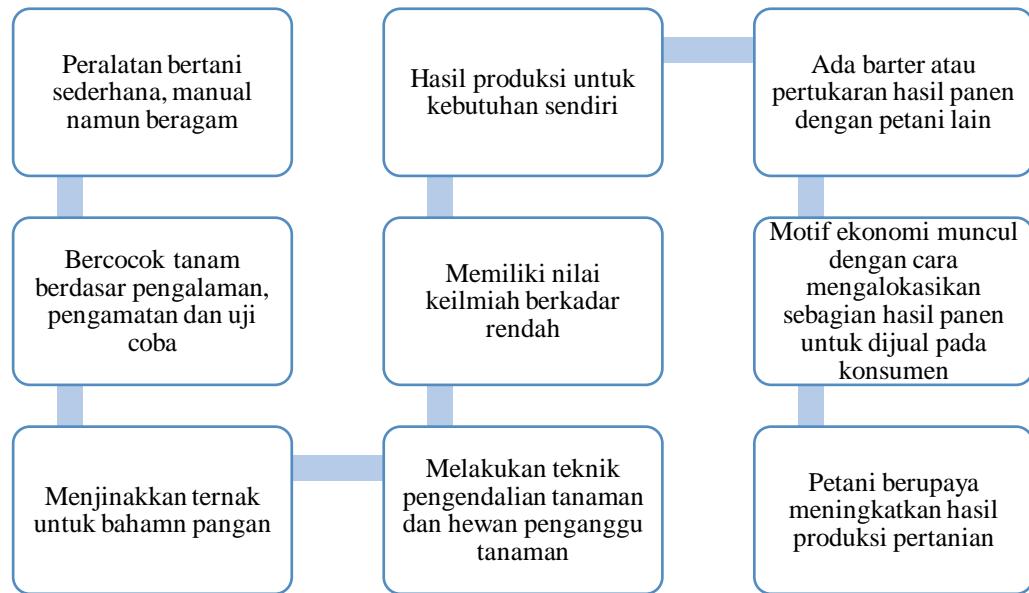
3.1.1 Pertumbuhan Pertanian Indonesia Pada Tahun 1967-1985

Indonesia adalah salah satu negara yang berbasis pada sektor agraria, di mana bidang pertanian memegang peranan penting dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pengembangan pertanian yang diterapkan petani Indonesia pada awalnya ialah sistem pertanian tradisional yang mengacu pada kegiatan bercocok tanam dengan peralatan sederhana dengan bantuan tenaga manusia berupa cangkul, garu, ani-ani, tugal, arit, parang bahkan hewan pembajak seperti kerbau dan sapi.¹ Penggunaan benih lokal serta pupuk kandang juga mendukung proses pertanian tradisional sebab para petani belum menggunakan pestisida. Cara bertani pada fase tradisional ditandai kepentingan pemenuhan kebutuhan hanya untuk konsumsi pribadi.

Sistem pertanian tradisional umumnya hanya mampu menghasilkan panen sekali dalam satu tahun, karena proses pertanian belum memanfaatkan teknologi modern sebagai penunjang. Sebagian besar petani tradisional belum memiliki pemahaman terhadap proses produksi yang mampu meningkatkan hasil dan keuntungan petani, sehingga berdampak pada rendahnya produktivitas padi. Hasil produksi yang rendah diakibatkan

¹ Dumasari. (2020). *Pembangunan Pertanian: Mendahulukan Yang Tertinggal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 16.

dari minimnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang digunakan petani.



Gambar 3.1 Pertanian Fase Tradisional

Sumber: Dumasari., 2020.

Kondisi pertanian yang kompleks di akhir pemerintahan Presiden Soekarno mengakibatkan rakyat mengalami kemiskinan, kelaparan serta kelangkaan pangan. Tuntutan dalam meningkatkan kebutuhan serta ketahanan pangan, menyebabkan Presiden Soeharto mendorong petani untuk melakukan inovasi teknik dalam bertani. Penggunaan alat pertanian untuk mengolah lahan, menanam, mengairi, memupuk, menyiangi, mengendalikan hama penyakit dan memanen semakin berkembang serta beragam. Petani berusaha meningkatkan hasil produksi panen melalui teknik *ekstensifikasi* dengan perluasan lahan pertanian dan teknik *intensifikasi* melalui pemanfaatan teknologi pertanian mulai dari pengolahan lahan,

pemilihan benih dan bibit, pengaturan sistem pengairan, pemupukan, obat pengendali hama penyakit serta peralatan bertani manual maupun mekanis.

Presiden Soeharto mendorong pelaksanaan modernisasi dan peningkatan intensif pada bidang pertanian, yang dikenal sebagai Revolusi Hijau (*Green Revolution*).² Pelaksanaan Revolusi Hijau pada tahun 1968 menjadi representasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang bertujuan untuk mendorong produksi pangan nasional melalui Panca Usaha Tani. Berdasarkan pendekatan Revolusi Hijau yang dikembangkan oleh Norman Borlaug terutama didasarkan pada teori peningkatan produktivitas pertanian melalui teknologi modern dan intensifikasi pertanian, pendekatan Revolusi Hijau tersebut digunakan pemerintah Indonesia untuk meningkatkan produksi pangan melalui penanaman benih unggul untuk komoditas seperti gandum, padi dan jagung yang dibarengi penggunaan pupuk kimia, bahan agrokimia, pestisida, sistem irigasi terencana serta teknik bercocok tanam yang lebih mutakhir. Revolusi Hijau merupakan strategi global untuk meningkatkan hasil produksi pertanian melalui transformasi dari praktik tradisional ke teknologi pertanian yang lebih maju. Pelaksanaan program Revolusi Hijau dijalankan melalui kebijakan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian.³

Produktivitas pertanian terutama padi, membutuhkan beberapa faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja serta modal. Sistem pertanian yang ideal

² Andrianto, D.A., *op.cit.*, hlm. 8.

³ Suci Ramadani, Hendra Naldi. (2020). *Swasembada Beras Era Orde Baru*.

adalah yang mampu menghasilkan secara optimal dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang terus berkembang dan berperan penting dalam meningkatkan mutu serta jumlah pengelolaan usaha tani, baik dari segi sumber daya manusia maupun alam secara seimbang.

Pembangunan infrastuktur dalam bidang pertanian mulai digalakkan untuk mendorong produktivitas pertanian sebagai strategi Presiden Soeharto, terutama pembangunan waduk, bendungan dan pembuatan saluran irigasi salah satunya peresmian jaringan irigasi Panatusan Tulung Agung oleh Presiden Soeharto pada 1983.⁴ Tujuannya untuk mendorong peningkatan hasil panen padi dan memajukan sektor pertanian Indonesia menuju sistem pertanian modern melalui efisiensi proses budidaya, edukasi dan penyuluhan para petani, pemanfaatan informasi serta teknologi pengelolaan yang mutakhir. Penggunaan teknologi tenaga mesin seperti traktor akan memudahkan serta mempercepat pekerjaan para petani bila dibandingkan hanya dengan penggunaan tenaga manusia.⁵

Proses pertanian modern Indonesia dimulai sejak tahun 1979 dengan fokus modernisasi teknologi, mekanisasi serta peningkatan kapasitas petani. Penggunaan mesin-mesin pertanian seperti traktor telah diupayakan oleh pemerintah untuk para petani dalam meningkatkan produksi pangan

⁴ Soeharto Library. (2013). Program Pertanian Era Pak Harto. <https://soehartolibrary.id/program-pertanian-era-pak-harto/> ,diakses pada 20 Juni 2025.

⁵ Lailatul., Muamaroh. (2017). Pelaksanaan Program Bimbingan Massal (Bimas) Padi Di Kabupaten Tulungagung Tahun 1984 - 1998. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(2), hlm. 407.

nasional sebagai bagian dari program Revolusi Hijau (*Green Revolution*). Teknologi yang dimanfaatkan dalam kemajuan sektor pertanian dipicu oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan riset yang berlangsung secara bersamaan. Inovasi dan kemajuan teknologi pertanian berdampak besar pada peningkatan efisiensi serta produktivitas padi yang meningkat serta berkualitas sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan secara keseluruhan. Para petani memerlukan dukungan pemerintah untuk dapat menyesuaikan diri pada berbagai perubahan yang menyangkut proses pengolahan pertanian, sehingga pemerintah menunjang penerapan sistem pertanian modern dengan pendidikan non-formal seperti penyuluhan atau bimbingan dengan tujuan agar para petani mampu menjalankan sistem produksi pertanian dan prinsip pertanian modern dengan seimbang.

Pertanian dengan teknologi modern, dimulai dari penggunaan bibit unggul, pupuk dan pestisida. Proses produksi modern mampu meningkatkan hasil panen, karena penggunaan teknologi mampu menyederhanakan kerja petani secara lebih efisien dalam menghasilkan produksi dalam jumlah besar. Pertanian modern memungkinkan para petani melakukan panen dua hingga tiga kali per tahun, yang menghasilkan peningkatan keuntungan yang mereka peroleh.

Pertanian modern meliputi perkembangan dalam varietas bibit yang digunakan pada pertanian Indonesia, dimulai dari varietas padi unggul dari *International Rice Research Institute* (IRRI) yaitu varietas IR-5 dan IR-8 yang didukung oleh pengembangan varietas bibit lokal PB-5 dan PB-8

dengan produktivitas 3,5 sampai 4,5 ton/ha yang memang dirancang untuk melengkapi varietas IRRI yang lebih intensif input. Berbagai dukungan yang diberikan oleh pemerintahan Soeharto dalam pengembangan sektor pertanian, terutama pengembangan tingkat usaha tani hingga pascapanen, mulai menampakkan hasilnya pada tahun 1980-an.

Produksi beras nasional meningkat menjadi 20,2 juta ton pada tahun 1980, didorong oleh penggunaan varietas padi unggul atau *High Yielding Variety* (HYV), terutama pemakaian varietas IR-36 dan IR-38 dari *International Rice Research Institute* (IRRI). Varietas IR-36 merupakan salah satu varietas padi unggul populer, sebab memiliki siklus tanam yang pendek sekitar 90-100 hari memungkinkan petani dapat panen 2-3 kali per tahun, terutama dalam lahan sawah irigasi. Varietas IR-38 diterapkan setelahnya dengan adaptasi yang lebih baik di lahan tada hujan dan toleransi terhadap kondisi lingkungan yang bervariasi.

Indonesia berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984 dengan produksi beras nasional mencapai lebih dari 25,9 juta ton.⁶ Keberhasilan swasembada beras tersebut didukung oleh penggunaan varietas bibit unggul seperti IR-36 juga didukung oleh pupuk kimia, pestisida serta perluasan irigasi yang memaksimalkan potensi dari varietas unggul tersebut. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai swasembada beras mendapatkan pengakuan internasional dari *Food and Agriculture*

⁶ A. Husni Malian, Chaerul Muslim dan Erwidodo. (1999). Penerapan Tarif Impor dan Implikasi Ekonominya Dalam Perdagangan Beras di Indonesia. *FAE (Forum Penelitian Agro Ekonomi)*, 17(1), hlm. 28.

Organization (FAO) dan mengantar Presiden Soeharto diundang berpidato di depan Konferensi ke-23 FAO di Roma, Italia tahun 1985. Dirjen FAO Dr. Edouard Saouma secara resmi menyerahkan penghargaan berupa medali emas pada tahun 1986.⁷ Prestasi tersebut mencerminkan keberhasilan Indonesia di kancah internasional sebagai negara pengimpor beras menjadi negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri, menunjukkan efektivitas langkah-langkah pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dan produktivitas pertanian nasional.

3.1.2 Penurunan Produktivitas Pertanian Indonesia Pada Tahun 1986-1996

Pencapaian swasembada beras pada tahun 1984 berhasil mewujudkan peningkatan hasil panen dalam negeri, namun kesuksesan tersebut belum mampu dipertahankan oleh pemerintah untuk jangka panjang. Memasuki dekade 1990-an produksi sektor pertanian nasional menunjukkan gejala pelandaian (*Leveling Off*) akibat penurunan efisiensi dan kelelahan tanah akibat intensifikasi berlebihan sedangkan kebutuhan pangan dalam negeri terus meningkat. Konsekuensi dari hal tersebut, Indonesia kembali bergantung pada impor beras guna mencukupi kebutuhan konsumsi pangan dalam negeri. Berikut beberapa penyebab kendala pada pertumbuhan pertanian Indonesia, di antaranya: 1) Penyusutan lahan sawah subur untuk kebutuhan non-pertanian, 2) Peningkatan produktivitas yang berjalan stagnan, karena belum muncul inovasi teknologi baru yang bisa mendorong produksi secara signifikan setelah masa revolusi hijau, 3) Fragmentasi lahan

⁷ Sari, *op.cit.*, hlm. 92-93.

terus menerus, mengakibatkan jumlah petani berlahan sempit bertambah, 4) Tenaga kerja di sektor pertanian makin tertumpu pada generasi tua dikarenakan generasi muda enggan bekerja di sektor pertanian dan 5) Kesenjangan antara hasil dengan usaha tani yang dilakukan para petani dan tingkat penelitian masih tinggi.

Penurunan produktivitas pertanian Indonesia salah satunya juga dipengaruhi oleh perubahan iklim. Fluktuasi cuaca ekstrem, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas cuaca buruk seperti banjir dan kekeringan sangat berpengaruh signifikan pada pola tanam dan hasil panen padi. Tanaman padi tergolong sensitif terhadap kondisi lingkungan dan perubahan, kondisi tersebut sering kali menyebabkan penurunan produktivitas pertanian.⁸ Kekeringan sempat beberapa kali terjadi di Indonesia di antaranya pada tahun 1987 dan 1992. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) penurunan terhadap produktivitas pertanian nasional menyebabkan pemerintah Indonesia tetap bergantung pada impor beras untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Keputusan pemerintah untuk impor beras menyebabkan harga hasil panen petani turun, baik dalam bentuk gabah kering giling (GKG) maupun beras lokal, hingga pendapatan para petani merosot.⁹ Kebijakan impor beras justru tidak memberikan

⁸ Ilham, Ramadhan., Muhammad, Muhammad., Try, Rizwar., Muhammad, F., Habibullah. (2025). Mengapa Indonesia Masih Harus Mengimpor Beras di Tengah Upaya Swambada. *Jurnal Sadewa: Publikasi Ilmu Pendidikan, Pembelajaran dan Ilmu Sosial*, 3(1).

⁹ Djoko, Suseno., Hempri, Suyatna. (2007). Mewujudkan Kebijakan Pertanian yang Pro-Petani. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 10(3).

manfaat terhadap sektor pertanian nasional malah cenderung semakin merugikan petani.

Pemerintah Indonesia seharusnya mengimbangi konsumsi beras dengan produksi beras sehingga dapat mencukupi kebutuhan pangan nasional. Sehingga saat kebutuhan beras dalam negeri telah tercukupi, sehingga pemerintah Indonesia memiliki peluang untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor beras dari luar negeri. Namun, pada kenyataannya pemerintah Indonesia tetap melakukan impor beras setiap tahunnya guna memastikan pasokan beras tetap tersedia di dalam negeri.¹⁰ Pemerintah telah berupaya dengan membuat Badan Urusan Logistik (Bulog) yang berperan dalam upaya stabilisasi harga dan penyerapan hasil panen petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Inovasi teknologi dalam pembangunan pertanian nasional baik secara konvensional maupun bioteknologi sama pentingnya untuk mendorong peningkatan produktivitas serta memperkuat daya saing produk pertanian dari tahun ke tahun dibarengi program penyuluhan untuk mengembangkan kualitas para petani. Teknologi-teknologi pertanian yang dulu efektif meningkatkan produksi beras tidak lagi memberikan hasil sebesar tahun sebelumnya.

¹⁰ Niken, Puspitasari., L.R. Indrawati, dan S.N. Sarfiah. (2019). Analisis Pengaruh Harga Beras, Cadangan Devisa, Dan Rata-Rata Konsumsi Beras per Kapita Seminggu Terhadap Impor Beras Di Indonesia Tahun 2008-2017, *Dinamic: Directory Journal of Economic*, 1(1).

Tabel 3.1 Produktivitas Pertanian dan Impor Beras Indonesia Pada Tahun 1985-1996

Tahun	Produktivitas Pertanian (Ton/ha)	Impor Beras (Ton)
1986	3.97	27.765
1987	4.03	54.982
1988	4.11	32.730
1989	4.24	268.321
1990	4.3	49.577
1991	4.34	170.994
1992	4.34	611.697
1993	4.37	24.580
1994	4.34	633.048
1995	4.34	1.807.875
1996	4.41	2.149.758

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel di atas, produksi pertanian setelah swasembada beras tetap mengalami pertumbuhan namun cenderung menunjukkan angka yang menurun dengan pertumbuhan yang lambat. Secara keseluruhan, produktivitas beras Indonesia dengan pertumbuhan impor beras memperlihatkan adanya keterkaitan, dengan tingkat fluktuasi yang terjadi. Volume impor beras berpotensi menurun apabila kebijakan harga pasar yang ditentukan pemerintah mampu melindungi petani dari potensi kerugian, jika kebijakan tersebut efektif maka keuntungan yang diperoleh petani bisa digunakan untuk meningkatkan hasil produksi, sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri dapat terpenuhi secara optimal.¹¹

3.1.3 Kebijakan Pertanian Indonesia Pada Tahun 1967-1996

Pertanian menjadi fokus utama pembangunan ekonomi dibawah pemerintahan Presiden Soeharto dengan tujuan swasembada pangan,

¹¹ Headhi Berlina Siringo dan Murni Daulay. Analisis Keterkaitan Produktivitas Pertanian dan Impor Beras di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(8).

revolusi hijau, peningkatan ekspor dan stabilitas ekonomi. Kebijakan pertanian Indonesia dapat mencakup berbagai bentuk, mulai dari program, regulasi, lembaga hingga infrastruktur yang diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian terutama swasembada pangan dan modernisasi pertanian. Kebijakan pertanian yang diwujudkan dalam pembentukan lembaga atau badan dalam mendukung tujuan pembangunan pertanian, sejalan dengan peran pemerintahan Soeharto yang sentralistik dalam mengandalkan lembaga-lembaga negara untuk mengelola, mengawasi dan melaksanakan kebijakan secara terkoordinasi. Pemerintah membentuk lembaga-lembaga khusus untuk mencapai tujuan tersebut dengan peran spesifik dalam rantai produksi, distribusi dan pengawasan pertanian. Beberapa lembaga atau badan yang dibentuk sebagai bagian dari kebijakan pertanian pada tahun 1967-1996, yaitu.

1) Badan Urusan Logistik (BULOG)

Badan Urusan Logistik (BULOG) dibentuk pada 14 Mei 1967 sebagai pengganti Komando Logistik Nasional (Kolognas), berdasarkan Keputusan Presiden No 114/U/KEP/1967 dengan tujuan pengadaan pangan nasional, terutama beras.¹² Penerbitan Keputusan Presiden No. 272 Tahun 1967 menyatakan kewenangan Badan Urusan Logistik (BULOG) sebagai lembaga tunggal dalam negeri yang mengurusi masalah pembelian dan penyediaan pangan. Bank Indonesia memperkuat hal tersebut sebagai satu-

¹² Juli Panglima Saragih. (2016). Kelembagaan Urusan Pangan dari Masa Ke Masa dan Kebijakan Ketahanan Pangan. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 17(2).

satunya lembaga yang mengurus pembiayaan dalam penyelenggaraan tugas Bulog sebagai agen pembeli tunggal. Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1969 tentang Struktur Organisasi serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Urusan Logistik, keputusan tersebut membuat struktur organisasi Badan Urusan Logistik (BULOG) menyesuaikan fungsinya sebagai pengatur cadangan pangan (*Bufferstock*) untuk mendorong peningkatan hasil produksi pangan.

Tugas pokok Badan Urusan Logistik (BULOG) berdasarkan Keputusan Presiden No. 39 Tahun 1969 ialah melaksanakan kebijakan sebagai sebuah lembaga nasional yang bertanggungjawab terhadap stabilisasi harga beras. Badan Urusan Logistik (BULOG) melakukan pembelian beras pada musim panen dengan harga minimum, untuk menghindari adanya penurunan harga akibat stok beras yang terlalu banyak. Berdasarkan Keppres RI No. 39 Tahun 1978 Badan Urusan Logistik (BULOG) berstatus hukum sebagai Lembaga Pemerintah Non-Departemen (LPND) yang bertanggung jawab serta di bawah kendali Presiden. Tugas pokok tersebut di revisi kembali melalui Keputusan Presiden No 39 tahun 1987, dengan tujuan menyosong tugas Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka mendukung pembangunan komoditas pangan yang multi komoditas. Cara kerja Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam mengelola pangan dalam negeri bergantung pada Undang-Undang yaitu melalui Keputusan Presiden, selain untuk mengatur wewenang Badan Urusan Logistik (BULOG) melalui Keputusan Presiden juga pemerintah mengatur tentang struktur, tata kerja,

pembiayaan, kepegawaian serta pembentukan Badan Urusan Logistik (BULOG) daerah.¹³

2) Koperasi Unit Desa (KUD)

Pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mendongkrak hasil pertanian, sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973 mengenai Unit Desa. Koperasi Unit Desa (KUD) dibentuk atas inisiatif pemerintah pusat (top-down) dan memperoleh dukungan penuh dari otoritas negara.¹⁴ Koperasi Unit Desa (KUD) dimulai atas Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1973 yang memerintahkan untuk meleburkan koperasi-koperasi yang berdiri di suatu wilayah unit desa menjadi Badan Usaha Unit Desa (BUUD) atau Koperasi Unit Desa. Peleburan koperasi-koperasi menjadi satu kesatuan dalam bentuk Koperasi Unit Desa (KUD) bertujuan untuk memudahkan pengelolaan oleh pemerintah serta menyinergikannya dengan program-program lainnya. Pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 1978 untuk memperjelas bentuk badan hukum BUUD harus berupa KUD. Koperasi Unit Desa (KUD) diharapkan menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang tidak semata-mata berfungsi sebagai koperasi pertanian saja.

Keterlibatan Koperasi Unit Desa (KUD) semakin luas pada sektor ekonomi pedesaan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 1984 mengenai Pembinaan dan Pengembangan KUD. Berdasarkan Inpres

¹³ Fauzan Adi Ashari, et al., (2015). Pasang Surut Sejarah BULOG di Indonesia pada tahun 1967-1998. *Artikel Ilmiah Mahasiswa*.

¹⁴ Jatmiko, Wahyudi., Siti Qorrotul Aini. (2020). Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa Menggunakan Balanced Scorecard. *Jurnal Litbang*, 16(2).

tersebut pembentukan Koperasi Unit Desa (KUD) dapat dibentuk oleh kombinasi masyarakat dari sejumlah desa yang memiliki keterkaitan. Wilayah kerja Koperasi Unit Desa (KUD) mencakup kumpulan desa yang saling terhubung secara sosial dan ekonomi, dengan luasnya dapat ditetapkan kapasitas ekonomi wilayah dan cakupan daerah tempat tinggal para anggotanya. Dengan demikian, bisa saja terbentuk lebih dari satu unit KUD dalam satu wilayah kecamatan.

Program pemerintah yang dilaksanakan Koperasi Unit Desa (KUD), di antaranya: 1) Program pendistribusian pupuk, 2) Program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI), 3) Program pengadaan cengkeh, 4) Program pengadaan pangan (beras dan gula), 5) Kredit Usaha Tani (KUT).¹⁵ Koperasi Unit Desa (KUD) memiliki peran sebagai penyedia sarana produksi pertanian seperti pupuk, pestisida serta pascapanen pada sebelum panen sekaligus bertugas mengumpulkan hasil panen padi sebelum didistribusikan pada Badan Urusan Logistik (BULOG). Keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) memberikan dampak besar bagi masyarakat pedesaan terutama petani.

3) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) merupakan perkembangan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Puslitbang Pertanian) yang telah dibentuk tahun 1970 sebagai unit teknis di bawah Departemen Pertanian yang bertugas melakukan kegiatan penelitian pertanian secara tematik dan terbatas pada komoditas

¹⁵ Nasution, H. M. (1990). Keragaan Koperasi Unit Desa Sebagai Organisasi Ekonomi Pedesaan. *Disertasi*. Bogor: Insitut Pertanian Bogor.

ataupun suatu wilayah tertentu. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sendiri berada di bawah Kementerian Pertanian, yang memainkan peranan penting dalam pengembangan varietas lokal padi selama periode ini sebagai bentuk kerja nyata dalam mendukung swasembada beras serta Revolusi Hijau.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) resmi didirikan pada 26 Agustus 1974. Tugas dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) tersebut melakukan riset dan pengembangan teknologi pertanian, termasuk pengembangan varietas tanaman yang disesuaikan dengan kondisi pertanian Indonesia. Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sesuai Keputusan Presiden No. 45 Tahun 1974 mengenai pembentukan dan struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sebagai bagian dari reorganisasi Departemen Pertanian. Presiden Soeharto menetapkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) sebagai unit Eselon I dibawah Kementerian Pertanian yang membawahi 12 unit Eselon II, yaitu: Sekretariat, 4 Pusat (Pusat Penyiapan Program, Pusat Pengolahan Data Statistik, Pusat Perpustakaan Biologi dan Pertanian, dan Pusat Karantina Pertanian), 2 Pusat Penelitian (Puslit Tanah dan Puslit Agro-Ekonomi) serta 5 Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang Tanaman Pangan, Puslitbang Tanaman Industri, Puslitbang Kehutanan, Puslitbang Peternakan dan Puslitbang Perikanan).

Tugas salah satu unit pusat penelitian dan pengembangan yaitu Pusat Penelitian Tanaman Pangan berfokus pada pengembangan varietas padi lokal termasuk PB-5 dan PB-8 yang dirancang untuk melengkapi penggunaan varietas unggul dari *International Rice Research Institute* (IRRI) sejak tahun 1980. Varietas padi lokal PB-5 dan PB-8 merujuk pada Padi Bali dengan angka tersebut sebagai petunjuk seri pengembangannya. Varietas padi tersebut dikembangkan melalui persilangan genetik antara padi lokal dan varietas unggul untuk menghasilkan tanaman dengan ketahanan terhadap hama dan penyakit lokal, seperti wereng cokelat dan penyakit blas dan juga pengembangan bibit unggul lokal dimanfaatkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap teknologi bibit asing.

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) memperkuat infrastruktur riset melalui balai penelitian seperti Balai Penelitian Tanaman Padi di Sukamandi sekaligus pengembangan teknologi komoditas lain seperti jagung, kedelai dan hortikultura selain padi. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) menghadapi kebutuhan untuk diversifikasi pertanian seiring stabilnya produksi padi pada pertengahan tahun 1980-an hingga awal tahun 1990-an. Penguatan kolaborasi antara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) dengan *International Rice Research Institute* (IRRI) dalam pengembangan varietas bibit juga menjalin hubungan dengan *Consultative Group on International Agricultural Research* (CGIAR) yang mendukung penelitian tanaman pangan seperti jagung dan kedelai. Pertengahan tahun

1980-an Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) bekerja sama dengan *Food and Agriculture Organization* (FAO) untuk mengembangkan sistem irigasi sejalan dengan pengakuan atas keberhasilan Indonesia pada swasembada beras.

4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dibentuk secara struktural melalui Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 bergerak sebagai unit pelaksana penyuluhan di tingkat kecamatan yang secara administratif, pengelolaan dan pengaturannya menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota.¹⁶ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dibentuk sebagai lembaga pemerintah untuk mendukung modernisasi dan peningkatan produktivitas pertanian terutama beras dengan memberikan pelatihan, bimbingan serta informasi mengenai teknik bercocok tanam modern langsung kepada petani baik secara individu maupun kelompok tani dan dikelola oleh Penyuluhan Pertanian Lapangan (PPL). Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dianggap menjadi basis kegiatan penyuluhan.¹⁷ Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) beroperasi di bawah koordinasi Kementerian Pertanian dan Instansi terkait dengan fokus pada intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

¹⁶ Aulia Khoirunisa. (2024). Peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dalam Memberdayakan Ekonomi Kelompok Tani Sugih Tani II Melalui Usaha Bunga Potong di Desa Ciwalen Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

¹⁷ Sumaryo Gitosaputro,. Indah Listiana. (2018). *Dinamika Penyuluhan Pertanian: Dari Era Kolonial Sampai Dengan Era Digital*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut: 1. Merancang program penyuluhan tingkat kecamatan selaras dengan rencana kegiatan penyuluhan di tingkat kabupaten, 2. Mengimplementasikan penyuluhan pertanian sesuai program penyuluhan pertanian, 3. Menyalurkan informasi terkait teknologi, alat produksi, pembiayaan, serta akses pasar, 4. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha, 5. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluhan PNS, penyuluhan THL-TBPP, THL-Kabupaten, swadaya dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan, 6. Melaksanakan kunjungan dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan sejalan dengan program penyuluhan pertanian, 7. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) berdampak signifikan terhadap bidang pertanian, di antaranya: *Pertama*, meningkatkan produksi pangan terutama beras dengan penerapan teknologi modern berupa pemakaian varietas bibit unggul, pupuk kimia, pestisida dan sistem pengairan. *Kedua*, penyuluhan memberikan dampak sosial dan ekonomi berupa peningkatan pendapatan petani melalui kredit modal dan subsidi. *Ketiga*, badan penyuluhan menjadi penghubung antara kebijakan pemerintah dan petani untuk meningkatkan partisipasi petani dalam program intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian.

3.1.4 Program-Program Pembangunan Pertanian Indonesia Pada Tahun 1967-1996

Keberhasilan pertanian Indonesia dalam swasembada beras pada tahun 1984 dicapai oleh penerapan beberapa program pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan produksi beras melalui pendekatan intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pertanian. Program pertanian tersebut, di antaranya:

1) Bimbingan Massal Gotong Royong (BIMAS GT)

Keterbatasan devisa negara menyebabkan penerapan program Bimbingan Massal Nasional digantikan dengan memperkenalkan sistem Bimbingan Massal Gotong Royong (BIMAS GT) oleh pemerintah pada tahun 1968/1969 dalam rangka mendorong peningkatan hasil pertanian khususnya komoditas beras.¹⁸ Program Bimas Massal Gotong Royong (BIMAS GT) adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta luar negeri terutama dalam hal pendanaan. Pihak swasta asing menyediakan dana untuk kebutuhan produksi seperti benih, pupuk, insektisida serta pemberantasan hama.

Pada tahun 1969 pemerintah mengeluarkan Keppres RI Nomor 95 Tahun 1969 tentang Organisasi dan Tata Kerja Bimas (Bimbingan Massal Pertanian). Keputusan Presiden tersebut menetapkan pembentukan lembaga pengelola Bimas mulai dari tingkat departemen, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Bimbingan Massal (Bimas) dimaknai sebagai

¹⁸ Fakultas Pertanian. (2002). *Tahun 1963 Perguruan Tinggi Menjawab Tantangan Masalah Pangan*. Bogor: Ipb Press. Hlm. 37.

kegiatan penyuluhan pertanian berskala besar yang ditujukan untuk menaikkan hasil produksi melalui metode intensifikasi, khususnya beras sekaligus memperbaiki taraf hidup petani dan masyarakat.

Penerapan program Bimas Gotong Royong terdapat tiga manfaat, di antaranya :¹⁹

- 1) Bimas Gotong Royong menunjukkan keberhasilannya melalui keterlibatan pengusaha swasta dalam negeri, sekaligus mampu menyalurkan pupuk dan sarana produksi lainnya langsung ke desa hingga sawah-sawah petani.
- 2) Teknik penyemprotan udara terbukti efektif dalam mengendalikan hama padi terutama sundep dan beluk yang menyebar luas di wilayah-wilayah endemik dan sulit dijangkau sebelumnya.
- 3) Para petani yang tidak tergabung dalam program Bimas Gotong Royong memanfaatkan pupuk murah dari program tersebut, karena telah terbukti membantu peningkatan produksi padi melalui efektivitas pupuk dan pestisida.

2) Intensifikasi Masyarakat (INMAS)

Program Intensifikasi Masyarakat (Inmas) serupa dengan intensifikasi massal yang menjadi penyempurnaan dari program Bimas. Program Inmas sejalan dengan Revolusi Hijau serta program Repelita I pada tahun 1969.²⁰ Intensifikasi Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk

¹⁹ *Ibid*, hlm. 49.

²⁰ Abdurakman, Pradono A, Sunarti L, Zuhdi S. (2018). *Sejarah Indonesia Kelas 12 (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

memaksimalkan hasil panen serta mutu produk pertanian dari lahan yang dikhkususkan pada pertanian dengan memproduksi komoditas tanaman padi. Kegiatan pertanian dalam program ini dilakukan dalam program intensifikasi pertanian.

Program Inmas atau Intensifikasi Pertanian merupakan implementasi dari Panca Usaha Tani. Pada perkembangannya program ini diteruskan melalui konsep Sapta Usaha Tani yang diaplikasikan melalui berbagai praktik kegiatan, sebagai berikut; 1) Pengolahan tanah yang baik, 2) Pengairan yang teratur, 3) Pemilihan bibit unggul, 4) Pemupukan, 5) Pemberantasan hama dan penyakit tanaman, 6) Pengolahan pascapanen, dan 7) Pemasaran.

Pendapatan petani disebutkan lebih unggul pada pertanian yang menerapkan program Bimas dan Inmas. Produktivitas sawah intensifikasi lebih unggul jika harus dibandingkan dengan sawah yang dikelola secara konvensional. Secara keseluruhan, program Bimas dan Inmas telah mengangkat taraf hidup petani serta kesejahteraan hidup petani.

3) Intensifikasi Khusus (INSUS)

Berdasarkan periodisasi sejarah, program Insus muncul pada tahun 1979 yang diatur dalam SK Menteri Pertanian/Ketua Badan Koordinasi Bimas No.003/1979.²¹ Program Insus menerapkan konsep sapta usaha tani dengan penguatan dalam pengembangan dan penggunaan teknologi

²¹ Suryana, A., L.A. Daud., J. Situmorang dan B. Irawan. (1992). *Pengelolaan Usaha tani Padi Sawah Insus dan Innum*. Jakarta: Pusat Penelitian Agro Ekonomi. Badan Litbang DepartemenPertanian.

pertanian yang lebih kuat. Intensifikasi Khusus (Insus) memberikan penekanan pada hasil dari setiap satuan hektare sawah. Program Insus telah mencatat keberhasilan sejak Repelita I hingga Repelita V dengan hasil panen mencapai 48,181 juta ton dari luas lahan 11.021.800 hektare.

Teknologi panca usaha yang dijalankan pada Intensifikasi Khusus (Insus) ialah implementasi mengenai varietas bibit, pemupukan, obat-obatan, pola cocok tanam serta sistem irigasi.²² Kelima aspek tersebut tidak dapat diterapkan pada semua daerah, namun pemerintah membuat kebijakan bagi daerah yang tidak dapat disentuh Insus dengan menerapkan program Operasi Khusus (Opsus). Pemerataan program Insus maupun Opsus di setiap wilayah yang tidak dapat tersentuh, pemerintah membuat program Intensifikasi Umum (Innum) yang tidak memiliki syarat spesifik. Secara keseluruhan, penerapan program Innum disempurnakan oleh Insus serta Opsus.

4) Supra Insus

Supra Insus merupakan program meningkatkan produktivitas pertanian padi yang telah diterapkan sejak tahun 1987. Program Supra Insus memberikan penekanan pada penguatan teknologi pertanian dengan penggabungan rekayasa 2 aspek yaitu ekonomi dan sosial. Penggabungan tersebut dalam realisasinya dilakukan melalui intensifikasi pertanian dengan skema memfasilitasi para petani dengan kerjasama antar kelompok tani yang tergabung dalam Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP).

²² Sri, Wahyuni., & Kurnia, S., Indraningsih. (2003). Dinamika Program Dan Kebijakan Peningkatan Produksi Padi. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 21(2).

Kerjasama antar kelompok memungkinkan para petani untuk dapat bergerak beriringan dalam mengatasi persoalan secara bersama-sama.²³

Pelaksanaan Supra Insus menerapkan 10 unsur teknologi yang disebut 10 Unsur Teknologi Supra Insus, di antaranya: 1) Pengaturan pola tanam, 2) Pengolahan Tanah yang sempurna, 3) Penggunaan benih yang bersertifikat berlabel biru, 4) Pergiliran varietas, 5) Penerapan jarak tanam yang sesuai dengan buku teknis, 6) Pemupukan berimbang, 7) Tata guna air di tingkat usaha tani, 8) Penggunaan pupuk pelengkap cair, 9) Pemakaian pestisida secara bijaksana dan pengendalian jasad pengganggu secara terpadu dan 10) Penanganan panen dan pascapanen.²⁴

5) Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (SUTPA)

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mengimplementasikan studi terhadap Sistem Usaha Tani Berbasis Padi Berwawasan Agribisnis (Sutpa) sebagai salah satu metode alternatif dalam pengembangan budidaya padi sawah irigasi. Pada tahun 1995 hingga 1996 kegiatan pengkajian Sutpa dilakukan di 14 provinsi utama dengan cakupan wilayah pengkajian seluas 46.000 hektare.²⁵ Ide dasar Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (Sutpa) adalah bertujuan membangun sistem

²³ Syahrul, Y. L., Imam, M.F., Suwandi, Ugi, S., Nurina, E.P., Rachmat, & Prima, G. (2022). *Mengulang Sukses Swasembada Beras Dari Zaman Orde Baru*. Bogor: IPB Press.

²⁴ Fakultas Pertanian IPB., *op.cit.*, hlm. 60-61.

²⁵ Achmad., Suryana., dan Ketut., Kariyasa. (1997). Efisiensi Usaha Tani Padi Melalui Pengembangan Sutpa, *FAE* 15(1 & 2), hlm. 68.

pertanian yang modern, tangguh dan efisien melalui adaptasi teknologi spesifik yang sesuai dengan kondisi lokal.

Tujuan utama dari kajian Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (Sutpa) antara lain:²⁶ 1) Mempercepat distribusi benih unggul baru untuk tanaman padi, jagung, kedelai serta sayuran dalam rangka mengatasi rendahnya produktivitas dan mendorong peningkatan hasil produksi nasional, 2) Penguanan sistem pertanian berbasis lokasi dengan efisiensi tinggi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia serta peningkatan indeks pertanaman (IP) minimal hingga 300%, 3) Meningkatkan daya saing produk pangan sebagai input industri agro maupun produk turunannya dalam kerangka agribisnis, 4) Meningkatkan pendapatan petani serta mengubah pola pikir dari pertanian subsisten ke arah pertanian modern dan komersial melalui penerapan teknologi terintegrasi secara efisien.

Tujuan dari pengembangan Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (Sutpa) adalah efisiensi tenaga kerja dengan memperkenalkan teknologi seperti Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) dan penggunaan herbisida pra-tumbuh serta pembasmi gulma guna mengatasi keterbatasan tenaga kerja. Dalam beberapa lokasi penelitian Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (Sutpa) penggunaan metode Tanam Benih Langsung (Tabela) terbukti mengurangi kebutuhan

²⁶ Adnyana, M.O. dan K. Kariyasa. (1997). Sutpa sebagai Alternatif Pendekatan Pengembangan Tanaman Pangan di Lahan Sawah Irigasi. *Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Ekonomi Pedesaan dan Peningkatan Daya Saing Sektor Pertanian*. Bogor.

tenaga kerja antara 17,01 % hingga 38,56% dibandingkan Sistem Tanam Pindah (Tapin).²⁷

Sementara itu, di lokasi kajian lainnya penggunaan tenaga kerja pada sistem Tabela menunjukkan jumlah yang sebanding dengan sistem Tapin. Penerapan Sistem Usaha Tani Berbasis Padi dengan Berwawasan Agribisnis (Sutpa) secara keseluruhan dianggap sebagai salah satu alternatif pendekatan pengembangan sistem usaha pertanian yang menunjukkan berbagai keunggulan pada masanya.

3.1.5 Tantangan Pembangunan Pertanian Indonesia Pada Tahun 1967-1996

Pembangunan pertanian Indonesia pada periode ini berhasil mencetak prestasi besar seperti swasembada beras, keberhasilannya tidak lepas dari tantangan serius yang bersifat struktural dan berjangka panjang terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam, dampak lingkungan dan masalah sosial di antara para petani. Anggaran besar yang dialokasikan untuk menciptakan swasembada beras mengakibatkan beban hutang kepada perusahaan asing yang memberikan efek jangka panjang, terutama dengan permasalahan setelah pencapaian swasembada beras yang terkadang seperti bersifat pemaksaan untuk menciptakan harga pangan yang murah daripada sebagai hasil upaya berkelanjutan.²⁸

Pembangunan pertanian Indonesia bekerja sama dengan negara-negara luar untuk inovasi dan teknologi modern, berakibat terhadap ketergantungan

²⁷ Achmad., Suryana., Ketut., Kariyasa, *op.cit.*, hlm.78.

²⁸ Muhammad, Rifqi. (2023). Pencapaian dan Persoalan Swasembada Beras Masa Orde Baru (1984).

pada perusahaan asing dalam menyediakan input pertanian membuat negara rentan terhadap fluktuasi pasar global. Tantangan lain saat swasembada beras tercapai ialah peningkatan kuantitas produksi beras yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas yang akhirnya menyebabkan penurunan harga beras. Petani kesulitan mendapatkan keuntungan dari peningkatan produksi serta modernisasi pertanian, sehingga dengan kualitas beras yang rendah sangat merugikan petani dalam harga jual. Rendahnya penerimaan insentif ekonomi terhadap petani meskipun terjadi peningkatan produksi, menggambarkan ketidaksetaraan dalam manfaat ekonomi Revolusi Hijau. Ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas produksi beras menjadi masalah ketahanan pangan yang berkelanjutan dan pemberdayaan petani secara ekonomi.

Tantangan pada pembangunan pertanian dapat memengaruhi kemampuan sektor pertanian untuk berkembang secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani.²⁹ Secara keseluruhan tantangan pembangunan pertanian pada periode ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, Alih fungsi lahan pertanian. Rata-rata petani hanya memiliki sekitar 0,3 hektare lahan. Keterbatasan lahan ini dipicu oleh maraknya alih fungsi lahan subur ke penggunaan lain terutama di Pulau Jawa yang sedang

²⁹ Sri. Harjadi. (2011). *Jalan Simpang Pembangunan Pertanian Di Indonesia*. (Online) (<https://feb.budiluhur.ac.id/wp-content/uploads/2011/05/Jalan-simpang-Pembangunan-Pertanian-di-Indonesia-Sri-Harjadi.pdf> , diakses 09 Juni 2025)

mengalami urbanisasi dan pembangunan industri. Kondisi ini menyulitkan peningkatan efisiensi produksi dan membatasi potensi pendapatan petani.

Kedua, Masalah permodalan. Pada umumnya para petani di tingkat desa menghadapi keterbatasan modal yang menghambat kegiatan pertanian. Hal tersebut diatasi dengan peningkatan pendapatan dan perbaikan rasio nilai tukar hasil pertanian (*Terms Of Trade*) yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Pemerintah telah mengatasi persoalan ini melalui penyediaan fasilitas kredit melalui Bank Indonesia yang disalurkan lewat jaringan perbankan terutama pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk menyalurkan kredit usaha tani.

Ketiga, Teknologi. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi pertanian modern melalui program Panca Usaha Tani. Dampaknya, produktivitas per hektare mengalami peningkatan meskipun baru mencapai 4,0 ton per hektare yang tergolong lebih rendah dibandingkan negara lain yang mampu menghasilkan lebih dari 8,0 ton per hektare. Selain itu, biaya produksi pertanian khususnya padi masih cukup tinggi sehingga beras Indonesia masih belum bisa bersaing dengan beras dari negara lain.

Keempat, Tantangan dalam memasarkan hasil pertanian yang diperburuk oleh fluktuasi harga yang cenderung menurun di pasar dunia. Pemasaran produk pertanian memerlukan sistem niaga yang dikendalikan oleh lembaga yang mampu menstabilkan harga. Penyebab utama dari kondisi ini, ialah; Pertama, hasil pertanian yang cepat rusak dan tidak dapat disimpan dalam waktu lama tanpa bantuan teknologi, sehingga menyulitkan pendistribusian ke lokasi jauh. Kedua, hasil panen pertanian yang bersifat

musiman dengan waktu yang bersamaan menyebabkan saat panen raya pasokan berlimpah di pasar, hingga menyebabkan harga turun sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

3.2 Kondisi Pertanian Thailand Pada Tahun 1967-1996

3.2.1 Pertumbuhan Pertanian Thailand Pada Tahun 1967-1996

Thailand merupakan sebuah negara kerajaan dengan luas wilayah sebesar 513.120 km², dengan penggunaan luas wilayah seluas 221.100 km² atau setara 40% lahannya dijadikan sebagai lahan pertanian.³⁰ Secara khusus, Raja Rama V menjadi raja pertama yang memberikan perhatian serius untuk meningkatkan produktivitas pertanian Thailand dan diikuti oleh raja berikutnya yang menginstruksikan rakyatnya untuk memajukan sector pertanian Thailand meskipun dengan lahan terbatas. Sektor pertanian berperan penting dalam perekonomian Thailand, baik dalam produksi pangan maupun sebagai sumber pendapatan negara.

Pada awal perkembangannya, Thailand menerapkan Pertanian Tradisional atau Pertanian Kuno yaitu penanaman tradisional yang mengandalkan alam. Petani menanam sesuai musim termasuk membajak tanah di musim semi, menabur benih di musim panas, memanen hasil di musim gugur dan beristirahat di musim dingin atau mengikuti pola sesuai komunitas masing-masing. Kegiatan semacam itu telah berlangsung selama ribuan tahun dimana belum ada obat-obatan dan pupuk kimia, sehingga

³⁰ Moch, M., F., Fania, J.R., Siti, N.A., Riro, A.D.S., Karlina, A., Riva, A., Rudiana. (2024). Perbandingan Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Thailand dalam Mengendalikan Kondisi Beras Akibat Fenomena El-Nino 2023. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(5), hlm. 795.

hasil panen yang diperoleh sangat rendah karena tergantung pada alam dan cuaca (*Seasonality*). Perkembangan sektor pertanian Thailand mencapai titik yang disebut “Pertanian Kontemporer”. Periode transisi pembangunan pertanian Thailand dari tradisional menjadi kontemporer menghadapi berbagai permasalahan, sehingga pemerintah mengembangkan Pertanian Berkelanjutan atau sistem pertanian alternatif dengan prinsip sistem pertanian yang serupa.³¹

Pembangunan pertanian Thailand didukung oleh pembentukan departemen pertanian menjadi beberapa unit kecil, di antaranya departemen perikanan, departemen peternakan dan departemen padi. Setiap departemen memiliki dinas penyuluhan beserta program penyuluhanya masing-masing. Pemerintah Thailand menyadari terdapat ketimpangan antara program penyuluhan tersebut dengan program penyuluhan dinas lain, sehingga secara bertahap pemerintah Thailand mengembangkan sektor pertanian dengan cara mengatur kegiatan penyuluhan pertanian sesuai potensi petani setiap wilayahnya. Pada tahun 1977, pemerintah membentuk departemen penyuluhan pertanian pusat atau *Department of Agricultural Extension*, yang kemudian dilengkapi dengan kantor penyuluhan di tingkat kabupaten hingga provinsi. Penggabungan dinas-dinas tersebut dalam satu departemen

³¹ กิติศักดิ์ทองมีทิพย์. (2021). พัฒนาการเกษตรกรรมของประเทศไทย: ในมิติต้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตในมิติต้านการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. สารพัฒนาศาสตร์ปีที่ 4(1). (Kitisak Thongmithip. (2021). Pembangunan Pertanian Di Thailand: Dalam Dimensi Pembangunan Masyarakat Dan Kualitas Hidup. *Jurnal Studi Pembangunan*, 4(1)).

berdasarkan efisiensi biaya dan pelaksanaan program, serta mengurangi ketimpangan agar prosesnya dapat berjalan seimbang.³²

Pembentukan departemen penyuluhan turut disertai pelaksanaan berbagai program serta pendekatan skala nasional, termasuk pengembangan sistem irigasi dan penerapan Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Pengembangan sistem irigasi mempercepat proses pembangunan pertanian di wilayah desa, seiring meningkatnya kebutuhan akan jumlah dan kompetensi tenaga penyuluhan pertanian. Pertumbuhan pembangunan pertanian yang cepat mengakibatkan intensitas pertemuan masyarakat dengan penyuluhan menjadi lebih tinggi. Kegiatan penyuluhan pertanian di Thailand mulai memperoleh kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas.

Pendekatan penyuluhan yang berhasil diterapkan Thailand pada akhir tahun 1977 adalah Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) atau sistem *Training and Visit*. Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU), penyuluhan langsung mengunjungi kelompok sasaran guna menyampaikan informasi teknologi dan pengetahuan, memberikan pelatihan praktis, serta memotivasi masyarakat agar aktif dalam berbagai kegiatan, seperti organisasi tani, kelompok wanita tani, maupun pemuda tani. Sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU) dirancang untuk meningkatkan efektivitas masyarakat tani dalam kegiatan usaha tani supaya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

³² Sri, Harijati. (2014). *Sejarah dan Pengertian Penyuluhan Pertanian. Dasar-dasar Penyuluhan Pertanian. 1st edn.* Banten: Repozitori Universitas Terbuka.

Peran petani sangat penting sebagai sumber daya manusia atau penggerak utama dalam pertumbuhan sector pertanian, didukung kontribusi pemerintah dalam memberikan penyuluhan. Pertanian Thailand bergerak secara efisien dengan pemberian pelatihan mengenai teknik irigasi disertai penggunaan teknologi sehingga para petani menguasai teknik budidaya yang lebih modern. Secara teknis, untuk meningkatkan efisiensi produksi beras bermutu tinggi diperlukan benih padi yang berkualitas, baik untuk konsumsi ataupun untuk bersaing di pasar global. Pemerintah Thailand memiliki pusat pengembangan benih tanaman yang telah memproduksi dan menjual benih padi sejak lama yang dapat menghasilkan kuantitas dan kualitas beras yang sesuai dengan permintaan.

Pertanian menjadi sektor terbesar dalam pangsa PDB Thailand sekaligus mesin pertumbuhan ekonomi yang cepat dan menyediakan sumber utama pendapatan devisa untuk pengembangan sektor non-pertanian. Pada awal tahun 1980-an pertanian berhasil menyumbang sekitar 24% dalam pertumbuhan PDB, membuktikan bahwa pertanian menujukkan pertumbuhan yang positif dengan kontribusi utama ialah perluasan lahan serta tenaga kerja. Keberhasilan pengelolaan beras Thailand disebabkan oleh kebijakan pemerintah dalam membeli seluruh hasil panen padi dari petani dengan harga yang menguntungkan bagi mereka, lalu mendistribusikannya kepada masyarakat dengan harga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi rakyat Thailand. Dukungan pemerintah dalam upaya

penguasaan teknologi, manajemen pertanian serta pemanfaatan lahan pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan produktivitas pertanian.

Thailand berhasil sebagai salah satu negara pengespor beras terbesar di dunia. Selain unggul dalam produksi beras, Thailand juga menjadi produsen utama dalam komoditi gula, ubi kayu, jagung, kelapa sawit dan karet sekaligus sebagai negara pengekspor komoditas tersebut. Namun dalam penanaman komoditi kelapa sawit dan karet dilakukan secara hati-hati oleh pemerintah agar tidak menggunakan lahan pertanian, sebagai alternatif pemerintah memakai lahan yang dinilai kurang efektif untuk mulai ditanami tanaman karet dan kelapa sawit. Seiring dengan perkembangan sektor industri dan jasa pada perekonomian Thailand, sektor pertanian mengalami diversifikasi yaitu variasi dari padi ke hortikultura, ternak ataupun tanaman ekspor.

Pada pertengahan tahun 1980-an, kontribusi lahan menjadi kurang penting disebabkan penutupan perbatasan lahan. Pertanian Thailand sempat mengalami kemunduran yang dipicu oleh 2 faktor, di antaranya:

- 1) meningkatnya investasi asing dan liberalisasi keuangan yang memicu lonjakan investasi,
- 2) menurunnya syarat perdagangan. Penurunan pertumbuhan pertanian Thailand disebabkan oleh *dutch disease* yang berdampak besar pada struktur produksi serta ekspor pertanian. Perubahan struktural merupakan hasil dari upaya yang dilakukan petani dan pelaku usaha pertanian dalam menanggapi perubahan peluang dan kendala. Pemulihan terjadi setelah resesi ekonomi

pada tahun 1981 hingga 1982, terutama pada sektor non-pertanian. Pemulihan didorong oleh pertumbuhan manufaktur dan perubahan struktural dalam produksi pertanian.

3.2.2 Kebijakan Pertanian Thailand Pada Tahun 1967-1996

Pemerintah Thailand secara struktural menerapkan kebijakan pertanian yang dibedakan menjadi kebijakan umum dan kebijakan khusus.³³ Isi dari kedua kebijakan tersebut ialah:

Pertama, Kebijakan umum yang dibuat oleh pemerintah Thailand mencakup langkah-langkah yang berlaku secara luas untuk para petani serta komoditas pertanian, terutama penyediaan subsidi pupuk, benih dan irigasi. Kebijakan umum dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi petani secara keseluruhan. Langkah lainnya antara lain (a) Pendirian Pusat Penelitian, sebagai wadah mengembangkan varietas unggul baru agar dapat menyesuaikan iklim, seperti varietas padi IR (*International Rice Research Institute*), (b) Pembentukan *Public Warehouse Organization* (PWO), yang bertugas membantu produsen hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan harga yang layak atas produksinya, selain juga membantu konsumen untuk mendapatkan harga yang wajar pada saat terjadi perbedaan harga yang cukup besar antara produsen dan konsumen, dan (c) Pembentukan *Marketing Organization for Farmers* (MOF), yang dibentuk

³³ Utomo R. B. (2002). *Perkembangan dan Kebijakan Ekonomi Beras di Thailand dalam Kebijakan Perberasan di Asia*. Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Jakarta.

pada tahun 1974 bertugas mengorganisasi dan memfasilitasi pemasaran hasil pertanian para petani.

Kedua, Kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah Thailand lebih menargetkan serta diarahkan pada komoditas strategis seperti beras, karet dan tebu yang memiliki dampak besar pada pertumbuhan nilai ekspor dan kesejahteraan petani. Kebijakan khusus yang diterapkan pemerintah Thailand, di antaranya:

a. *Kebijakan Rice Premium*

Pemerintah Thailand menerapkan *Rice Premium* sebagai sebuah kebijakan ekstraktif yang paling menonjol sejak awal pembangunan ekonomi Thailand. Kebijakan ini berkaitan dengan harga, yang mencakup upaya pemerintah untuk menjamin harga gabah bagi petani. Penerapan kebijakan seperti pembelian gabah dari petani dengan harga subsidi sehingga pemerintah bisa menjualnya sesuai harga pasar internasional yang lebih tinggi dari harga pasar domestik, selisih harga tersebut dijadikan sebagai sumber pendapatan negara. Dana tersebut digunakan untuk membangun infrastuktur, pendidikan, kesehatan dan bidang lainnya yang menjadi fondasi penting modernisasi ekonomi Thailand.

Pemerintah dapat menahan stabilitas harga beras domestik sekaligus menjaga daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekspor beras yang tinggi menciptakan permintaan yang stabil serta akses pasar yang luas bagi hasil produksi panen. Kebijakan *Rice Premium* secara tersirat menunjukkan strategi pembangunan Thailand yang menempatkan sektor pertanian sebagai

sumber dana, bukan sebagai sektor prioritas yang mesti di modernisasi. Secara bertahap kebijakan ini mulai dihapuskan, diiringi tekanan domestik serta internasional untuk lebih adil terhadap para petani serta liberalisasi perdagangan.

b. Kebijakan *Paddy Mortgage Scheme*

Kebijakan skema gadai padi atau *Paddy Mortgage Scheme* diperkenalkan Thailand pada tahun 1980-an untuk menstabilkan harga padi, meningkatkan pendapatan petani serta mengurangi ketergantungan pada tengkulak yang sering menekan harga. Kebijakan tersebut mendukung petani padi dengan memberikan pinjaman berbunga rendah menggunakan hasil panen sebagai jaminan.

Dalam alur *Paddy Mortgage Scheme* para petani menjual hasil panennya ke pemerintah dengan harga tinggi melebihi harga pasar, para petani dapat menebus kembali gabah tersebut atau membiarkan pemerintah menjualnya dengan catatan apabila harga pasar lebih rendah pemerintah yang akan menanggung kerugiannya. Program ini dikelola oleh *Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives* (BAAC) yang berperan untuk menyalurkan modal kerja bagi para petani seperti sebuah pinjaman dengan kredit yang preferential mencapai 90% dari nilai padi yang digadaikan.³⁴

c. Modernisasi Terbatas

Modernisasi terbatas dalam kebijakan pertanian Thailand mengacu pada penerapan teknologi dan metode pertanian baru secara selektif, dengan

³⁴Achmad Suryana dan Ketut Kariyasa. (2008). Ekonomi Padi Di Asia: Suatu Tinjauan Berbasis Kajian Komparatif. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, 26(1).

fokus pada peningkatan produksi tanaman komersial, seperti padi, jagung dan ubi kayu untuk tujuan ekspor. Kebijakan ini secara keseluruhan tidak mengubah sistem pertanian tradisional, melainkan hanya mengadopsi beberapa modernisasi terutama penggunaan pupuk kimia, pestisida serta beberapa teknologi pertanian seperti traktor.

Kebijakan modernisasi dianggap "terbatas", karena pemerintah tidak berhasil menyentuh seluruh aspek pertanian secara merata, terutama distribusi teknologi pertanian, akses petani kecil terhadap kredit dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Petani kecil tetap menggunakan sistem pertanian tradisional dengan akses terbatas terhadap inovasi pertanian berbeda dengan petani besar yang memiliki modal yang cukup untuk menggunakan teknologi pertanian modern. Secara keseluruhan, pertumbuhan produksi pertanian serta peningkatan nilai ekspor Thailand, tidak disertai modernisasi yang menyeluruh menyebabkan ketimpangan antara petani besar dengan petani kecil.

d. Promosi Agribisnis Ekspor

Kebijakan promosi agribisnis ekspor dalam pertanian Thailand pada tahun 1967-1996 merupakan bagian integral dari strategi industrialisasi negara Thailand. Pemerintah Thailand secara agresif mendorong transformasi sektor pertanian dari produksi subsisten menjadi produksi ekspor skala besar melalui serangkaian kebijakan yang difokuskan pada peningkatan produksi komoditas bernilai tinggi di pasar global, seperti beras, tebu, dan karet. Kebijakan ini didukung investasi besar-besaran dalam

infrastruktur ekspor seperti pembangunan pelabuhan Laem Chabang pada tahun 1981 dan membangun jaringan transportasi yang menghubungkan daerah produksi dengan pusat ekspor.

Secara keseluruhan penerapan kebijakan ini berdampak signifikan terhadap Thailand hingga menjadi salah satu eksportir produk pertanian dunia. Strategi ini tidak hanya memperkuat posisi Thailand sebagai eksportir pertanian, namun juga menjadi fondasi bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

3.2.3 Teknologi Pembangunan Pertanian Thailand Pada Tahun 1967-1996

Thailand dikenal dengan teknologi pertaniannya yang telah lebih unggul dibandingkan Indonesia. Pemerintah Thailand mengembangkan teknologi pertanian secara sistematis dari tahun ke tahun. Pemerintah Thailand membentuk sebuah perjanjian dengan negara Inggris yang disebut dengan Perjanjian Bowring, yang memberikan dampak signifikan pada pertanian Thailand, mengubahnya dari sistem tertutup menjadi ekonomi yang lebih terbuka dan terintegrasi dalam perdagangan global. Pasca Perjanjian Bowring teknologi pertanian mengalami perubahan menjadi teknologi pertanian modern seperti percobaan mesin pertanian di Thailand. Mesin pertanian mengacu pada hal-hal yang diciptakan manusia untuk membantu mengurangi upaya dalam bertani, penggunaan alat pertanian tersebut dapat menghemat energi, waktu serta biaya menjadikannya lebih mudah serta cepat sebagai pengganti tenaga manusia.

Perkembangan dalam penggunaan teknologi untuk mendukung pertanian Thailand salah satunya melalui sistem penanaman padi dengan beberapa metode tergantung kondisi ekonomi dan sosial serta geografi masing-masing daerah, terdapat metode tanam, metode sebar kering atau sebar basah, metode sebar benih berkecambah atau sebar lumpur dan metode tanam kering. Penggunaan metode tanam pindah pada sebagian besar petani Thailand telah digunakan sejak zaman dahulu, sebab tidak memerlukan persiapan lahan yang rumit serta menggunakan bibit yang berusia sekitar 25 hingga 30 hari sehingga memiliki tinggi yang cukup serta dapat ditanam di sawah yang tergenang air untuk mengendalikan pertumbuhan gulma maka penggunaan bahan kimia dapat dikurangi. Namun, penanaman padi dengan metode tanam pindah menjadi pekerjaan yang melelahkan dan membutuhkan banyak tenaga kerja.

Penggunaan beberapa mesin tanam padi, seperti garpu tanam yang digunakan untuk menanam bibit dapat mengantikan tangan manusia, metode persiapan bibit dapat digunakan dengan sistem kerja mesin tanam padi secara optimal serta bentuk mesin tanam padi yang membantu memfasilitasi dalam meningkatkan kinerja yang lebih cepat. Thailand menggunakan dua jenis mesin tanam padi, di antaranya mesin tanam padi model Jepang dan mesin tanam padi model Republik Rakyat Tiongkok.

3.2.4 Tantangan Pertumbuhan Pertanian Thailand Pada Tahun 1967-1996

Pertanian Thailand menghadapi 4 tantangan utama dalam pertumbuhan pertanian. Pertama, Perubahan orientasi produksi pertanian dari komoditas

tradisional ke produk bernilai tinggi. Terdapat 4 langkah kebijakan yang dapat memfasilitasi serta mempercepat proses restrukturisasi, yaitu; 1) Penelitian di bidang perbaikan genetik dan teknologi pascapanen, 2) Meningkatkan dalam penelitian bioteknologi, 3) Merangsang produksi mutu pangan, serta 4) Lembaga yang efektif dalam penggunaan sumber daya alam berkelanjutan.

Kedua, memfasilitasi restrukturisasi pertanian menuju pola tanam yang insentif lahan tetapi kurang intensif air. Mengingat menurunnya tenaga kerja pertanian serta meningkatnya kelangkaan air.

Ketiga, mempromosikan profesionalisme dalam bertani dan memberikan perlindungan sosial bagi petani yang sudah lanjut usia. Hambatan yang dihadapi para petani baru ialah tingginya biaya investasi dalam teknik bertani baru dan pembentukan hubungan bisnis di pasar pangan dan pertanian modern. Sehingga dengan penyebaran tentang varietas baru, teknik produksi baru dan peluang bisnis dapat mengurangi hambatan masuk serta biaya dalam mencari para petani baru.

Keempat, memungkinkan para petani untuk memanfaatkan sepenuhnya peluang yang muncul dari lingkungan perdagangan yang lebih liberal serta untuk memungkinkan para petani yang kurang kompetitif untuk menyesuaikan sistem produksi.

3.3 Kesepakatan Kerjasama Pertanian Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

3.3.1 Kerjasama Pertanian Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Indonesia dan Thailand merupakan negara agraris dengan mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Namun, berbeda dengan Thailand yang menekankan kualitas sumber daya manusia dengan rancangan infrastuktur untuk mendukung keberhasilan pemenuhan kebutuhan pangan, Indonesia menghadapi permasalahan antara beras, petani dan pemerintah yang menyebabkan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri. Hubungan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand menyoroti keberhasilan pemerintah Thailand dalam pengelolaan serta penerapan teknologi pertanian mereka. Thailand memiliki kemampuan menghasilkan produktivitas pertanian 50 kali lipat serta potensi memanen sebanyak lima kali dalam setahun.³⁵

Dasar kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand ialah penandatanganan Agreement on Agriculture (AOA) pada 22 Februari 1984 di Jakarta sebagai kerangka dari hubungan bilateral di sektor pertanian sekaligus strategi diplomasi ekonomi kedua negara dalam dinamika regional ASEAN. Kesepakatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian termasuk dengan pertukaran teknologi, tenaga ahli, pengembangan SDM dan pengembangan agribisnis kedua negara dalam

³⁵ Kadek, D. A. N., Aglisya, F., Ayasha J. F., Dafa, P. S., & Fatur, S. R. (2024). Perbandingan Ketahanan Ekonomi: Studi Kasus Indonesia dan Thailand dalam Sektor Pertanian. *Journal Of Administrative And Social Science*, 5(1), hlm. 273–288.

pertanian. Seiring dengan dinamika global dan kebutuhan dalam kerjasama yang lebih fungsional, kesepakatan kerjasama mengalami amandemen pada 23 April 1996 sebagai langkah mengevaluasi validitas dari Agreement on Agriculture. Amandemen dari kesepakatan tersebut memperluas cakupan kerjasama yang mencakup promosi perdagangan komoditas, pengembangan dan penyuluhan pertanian, alih teknologi serta peningkatan sumber daya manusia.

Hubungan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand berperan dalam menaikkan kemampuan teknis serta manajemen pertanian di Indonesia, serta menaikkan akses terhadap inovasi teknologi terutama teknik pengelolaan lahan, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta sistem pengairan yang lebih modern.³⁶ Komoditas padi menjadi salah satu sektor utama dalam kerangka kerjasama tersebut, terutama terkait isu ketahanan pangan, alih teknologi dan perdagangan beras.

Hubungan kerjasama dapat ditingkatkan dengan melakukan penelitian bersama, pertukaran informasi, studi visit ataupun program bersama. Selain itu, dapat melakukan pengembangan pasar dan promosi hubungan perdagangan kancah internasional. Pada hakikatnya, pengembangan bidang pertanian dapat terintegrasi baik apabila pemerintah mampu memanfaatkan seluruh potensi baik sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya.

³⁶ Muhamad, N., Adi, N.A., Dafit, H., Atikah, E.F., & Daspar. (2024). Peluang dan Ancaman Perdagangan Produk Pertanian dan Kebijakan Untuk Mengatasinya: Studi Kasus Indonesia Dengan Thailand. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 01(04), hlm. 936.

3.3.2 Program-program dalam Kerjasama Pertanian Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Beberapa program yang dibuat dan disepakati oleh Indonesia dan Thailand dengan tujuan untuk meningkatkan sektor pertanian keduanya serta memperkuat hubungan bilateral dalam bidang agribisnis. Adapun program yang termasuk dalam agenda kerjasama pertanian keduanya, yaitu:

a. Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pertanian

Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pertanian menjadi langkah strategis dalam hubungan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Thailand sebagai negara yang lebih unggul dalam teknologi pertanian, memberikan bantuan teknis dan pelatihan pada Indonesia³⁷ mengenai teknologi budidaya padi modern, termasuk penggunaan pupuk agar efisien dan pengendalian hama yang dipelajari oleh Indonesia melalui pelatihan penyuluhan yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian (Bakorluh) untuk menaikkan efisiensi serta produktivitas pertanian Indonesia.

Program ini mengharapkan Indonesia mampu meningkatkan kemampuan produksi panen diikuti kualitas hasil pertanian serta mengurangi ketergantungan terhadap cuaca yang tidak menentu. Mendukung kolaborasi dalam program tersebut dapat memperkuat daya saing pertanian nasional di dunia internasional seperti Thailand.

³⁷*Ibid*, hlm. 936.

b. Pertukaran Data dan Informasi

Program pertukaran data dan informasi dalam kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand sekitar tahun 1967-1996 berperan penting dalam mendukung pengembangan sektor pertanian. Melalui pendekatan diplomasi fungsional, program kerjasama ini menjadi cerminan dari praktik *soft power diplomacy*, di mana kedua negara membangun kepercayaan dan saling ketergantungan melalui kolaborasi non-militer pada sektor ekonomi dan pertanian yang terbilang strategis. Program alih teknologi, data dan riset pertanian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan inovasi di sektor pertanian bagi kedua negara, termasuk di antaranya pelatihan sumber daya manusia dan pengembangan kapasitas petani.

Indonesia melalui salah satu lembaga seperti Pusat Penelitian dan Pengembangan Pertanian (Puslitbang Pertanian) berbagi data hasil penelitian tentang varietas unggul padi dan teknologi irigasi, sementara Thailand sebagai eksportir beras menyediakan informasi mengenai praktik budidaya padi yang efisien dengan teknologi pascapanen. Sebagai contoh, Indonesia mempelajari teknik pengendalian hama dan pengolahan beras dari Thailand untuk mendukung keberhasilan program Bimas sedangkan Indonesia berbagi data tentang pengolahan kelapa sawit dan karet yang menjadi keunggulan komparatifnya untuk menarik investasi ataupun kerjasama pengolahan dari Thailand.

Forum ASEAN memfasilitasi pertukaran data dan informasi tersebut dengan seminar teknis atau pun kunjungan delegasi meskipun pada periode

ini masih terbatas oleh teknologi informasi yang belum maju serta sistem pemerintahan sentralistik yang kurang melibatkan petani lokal. Meski demikian, program kerjasama ini membantu Indonesia meningkatkan kualitas produksi padi dan memperkuat posisi ekspor kelapa sawit, sedangkan Thailand mendapat manfaat untuk ekspor beras dan gula berdasarkan data pasar Indonesia.

c. Pengembangan Ekspor dan Perdagangan Produk Pertanian

Hubungan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand berupaya mengembangkan serta meningkatkan pertumbuhan ekspor. Peningkatan ekspor serta impor dapat menyeimbangkan pasokan pangan kedua negara, mengurangi biaya impor, memberikan lebih banyak akses pada konsumen serta memperluas ketersedian produk pada masing-masing negara. Pengembangan ekspor dan perdagangan produk pertanian dalam kerjasama pertanian pada tahun 1967-1996 berfokus pada pemanfaatan keunggulan komparatif masing-masing negara untuk memperkuat nerasa perdagangan serta ketahanan pangan. Indonesia melalui lembaga, seperti Perusahaan Umum Perkebunan (PTP) dan Badan Urusan Logistik (BULOG) mendorong ekspor komoditas kelapa sawit, karet dan kopi ke Thailand dengan komoditas kelapa sawit sebagai produk utama yang diimpor ke Thailand untuk kebutuhan industri dan konsumsi domestik. Sebaliknya Indonesia mengimpor beras dan gula dari Thailand untuk menutupi kekurangan produksi domestik.

Secara keseluruhan, perdagangan bilateral ini membantu Indonesia meningkatkan devisa melalui ekspor kelapa sawit dan menjaga pasokan pangan melalui impor beras, sementara Thailand mendapat akses pasar Indonesia dalam komoditas beras dan gula. Hubungan perdagangan ini menunjukkan pola saling menguntungkan dengan neraca perdagangan yang cenderung defisit bagi Indonesia.

d. Pembangunan Infrastuktur.

Pembangunan infrastuktur dalam program kerjasama pertanian berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses perencanaan, pembangunan dan pengembangan berbagai fasilitas fisik dan sistem pendukung yang dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan keberlanjutan dalam sektor pertanian melalui kolaborasi kedua negara. Pembangunan infrastuktur juga berdampak pada akses pasar serta distribusi dalam memudahkan produsen menjual hasil taninya untuk mengurangi biaya transformasi dan memperluas jangkauan pasar.

Pembangunan infrastuktur dalam hubungan kerjasama antara Indonesia dan Thailand lebih bersifat tidak langsung, berupa pembelajaran dari keahlian Thailand dalam pembangunan sistem irigasi dan fasilitas pascapanen, seperti gudang penyimpanan beras yang efisien. Prasarana pertanian, yaitu irigasi memang memegang peranan penting dalam meningkatkan produktivitas terutama tanaman padi.³⁸ Indonesia berbagi

³⁸ Sadono, S. *op.cit.*, hlm. 157.

pengalaman dalam pembangunan infrastuktur perkebunan kelapa sawit, seperti akses jalan dan fasilitas pengolahan. Pembangunan infrastuktur dalam hubungan kerjasama pertanian sempat terbatas oleh minimnya investasi langsung Thailand dalam infrastuktur pertanian Indonesia, serta fokus pemerintahan Soeharto yang lebih mengandalkan bantuan dari negara Jepang.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastuktur dalam kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand menciptakan manfaat jangka panjang yang tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi dan distribusi namun juga mempererat hubungan serta mendorong pembangunan berkelanjutan.

3.3.3 Tantangan Kerjasama Pertanian Antara Indonesia dan Thailand Pada Tahun 1967-1996

Hubungan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand memberikan keuntungan sekaligus menghadapi aspek tantangan yang menghambat potensi kolaborasi kedua negara. Tantangan kerjasama pertanian kedua negara pada tahun 1960-an hingga 1970-an ialah keterbatasan modal hingga krisis pangan. Kesepakatan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand secara resmi terjalin pada tahun 1984, sejak itu mulai menunjukkan pertumbuhan serta tantangan yang tidak bisa dihindari dalam hubungan kerjasama keduanya. Adapun tantangan kerjasama pertanian antara Indonesia dan Thailand pada periode 1984-1996 mencakup beberapa aspek dimulai teknis, struktural serta kebijakan yang mempengaruhi efektivitas dan perkembangan kerja sama. Salah satu

tantangan utama adalah kebutuhan untuk melakukan modernisasi dan alih teknologi pertanian secara efektif, mengingat perbedaan tingkat kemajuan teknologi pertanian antara kedua negara. Thailand sudah lebih maju dalam teknologi pengolahan produksi pangan dan manajemen agroindustri menjadi sumber pengalaman dan teknologi yang penting bagi Indonesia, namun proses transfer teknologi dan adaptasi di Indonesia memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup besar.

Tantangan lainnya adalah pengelolaan sumber daya alam, seperti konservasi tanah dan air yang menjadi bagian penting dalam kerjasama teknis pertanian. Pengelolaan ini harus menyesuaikan dengan perbedaan kondisi geografis dan iklim, sehingga memerlukan pendekatan yang tepat dan kerja sama riset yang intensif. Hambatan birokrasi dan koordinasi antar lembaga kedua negara juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program-program kerjasama sekaligus dalam pertukaran tenaga ahli dan pelaksanaan penelitian bersama.

Kendala dalam perdagangan produk pertanian juga muncul terutama terkait dengan perlindungan pasar domestik dan persaingan produk yang memerlukan kesepakatan dan regulasi yang jelas agar tidak menimbulkan konflik kepentingan. Selain itu, tantangan sosial seperti kurangnya minat generasi muda Indonesia terhadap sektor pertanian turut mempengaruhi keberlanjutan pengembangan agribisnis yang menjadi tujuan kerjasama ini.